

Meningkatkan Ekonomi Indonesia Kini:

Dari Pertumbuhan Menuju
Kesejahteraan Inklusif dan
Berkelanjutan



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

8 Juli 2026

MENINGKATKAN EKONOMI INDONESIA KINI: Dari Pertumbuhan Menuju Kesejahteraan Inklusif dan Berkelanjutan

Abstrak

Artikel ini membahas strategi peningkatan ekonomi Indonesia masa kini dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memperluas kesejahteraan, produktivitas, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Indonesia menunjukkan ketahanan makroekonomi yang relatif kuat. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 sebesar **5,61% year-on-year**, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun. Namun, struktur ekonomi masih menghadapi tantangan mendasar: konsentrasi kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, kualitas pekerjaan, kesenjangan produktivitas, ketergantungan pada komoditas, kapasitas industri bernilai tambah, serta kebutuhan memperkuat human capital, inovasi, tata kelola, dan ekonomi hijau. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa peningkatan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan PDB, tetapi harus mengubah struktur pertumbuhan agar lebih produktif, inklusif, regional-balance, berbasis pengetahuan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada enam agenda besar: penguatan produktivitas nasional, transformasi industri dan hilirisasi bernilai tambah, peningkatan kualitas SDM, penguatan UMKM dan ekonomi digital, reformasi tata kelola dan kepastian hukum, serta integrasi ekonomi hijau-biru dalam kebijakan pembangunan. Artikel ini juga

menekankan pentingnya kebijakan publik yang konsisten, berbasis bukti, adaptif terhadap perubahan global, dan mampu menjembatani kepentingan negara, pasar, masyarakat, serta generasi mendatang.

Kata kunci: *pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan inklusif, Indonesia, produktivitas, hilirisasi, UMKM, ekonomi digital, human capital, pembangunan berkelanjutan, tata kelola.*

1. Pendahuluan

Pertanyaan mengenai bagaimana meningkatkan ekonomi Indonesia kini tidak dapat dijawab hanya dengan menyebut angka pertumbuhan. Pertumbuhan memang penting, bahkan sangat penting, karena tanpa pertumbuhan sulit bagi negara untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbesar kapasitas fiskal, memperbaiki layanan publik, dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai pemerataan, transformasi struktural, inovasi, dan tata kelola yang baik dapat menghasilkan pembangunan yang rapuh. Ekonomi dapat tumbuh, tetapi sebagian besar masyarakat tetap rentan; investasi dapat meningkat, tetapi pekerjaan berkualitas tidak cukup tercipta; ekspor dapat naik, tetapi nilai tambah domestik terbatas; dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan, tetapi daerah-daerah tertinggal tetap tidak menikmati manfaat secara proporsional.

Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi semakin penting karena Indonesia berada pada persimpangan strategis. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar: populasi besar, pasar domestik luas, bonus demografi, sumber daya alam melimpah, posisi geostrategis, potensi ekonomi digital, serta pengalaman panjang menjaga stabilitas makroekonomi. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan berat: produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, ketimpangan antarwilayah, kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum merata, informalitas

pekerjaan, daya saing industri yang harus terus ditingkatkan, tekanan perubahan iklim, risiko geopolitik global, serta kebutuhan menjaga kepercayaan investor.

BPS melaporkan bahwa pada triwulan I-2026, Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi **57,24%**, sekaligus mencatat pertumbuhan 5,79% year-on-year. Fakta ini menunjukkan dua hal sekaligus: Jawa tetap menjadi mesin utama ekonomi nasional, tetapi Indonesia juga masih menghadapi tantangan pemerataan spasial pembangunan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, tema “meningkatkan ekonomi Indonesia kini” harus dibaca sebagai agenda transformasi. Pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan, tetapi kualitas pertumbuhan lebih menentukan masa depan bangsa. Kualitas pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa pertanyaan: Apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan layak? Apakah pertumbuhan menaikkan produktivitas? Apakah pertumbuhan mengurangi kemiskinan dan kerentanan? Apakah pertumbuhan memperkuat industri nasional? Apakah pertumbuhan memperluas kesempatan bagi UMKM, perempuan, pemuda, petani, nelayan, dan masyarakat daerah? Apakah pertumbuhan tidak merusak basis ekologis yang menjadi penyangga kehidupan generasi mendatang?

Artikel ini mengajukan tesis bahwa peningkatan ekonomi Indonesia harus bergerak dari paradigma **growth-centered development** menuju **inclusive and sustainable prosperity**. Dengan kata lain, pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kesejahteraan yang lebih luas: peningkatan kapabilitas manusia, keadilan akses, produktivitas, keberlanjutan sumber daya, dan kualitas institusi.

2. Dari Pertumbuhan Menuju Kesejahteraan: Kerangka Konseptual

Secara konvensional, keberhasilan ekonomi sering diukur melalui Produk Domestik Bruto atau PDB. PDB menggambarkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Namun, PDB

tidak secara langsung menjawab distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, kondisi lingkungan, tingkat kerentanan rumah tangga, kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, maupun rasa aman sosial. Karena itu, pertumbuhan PDB harus dipahami sebagai indikator penting, tetapi tidak lengkap.

Amartya Sen memperluas pengertian pembangunan dengan menekankan **capability approach**, yaitu pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang bernilai. Dalam perspektif ini, pendapatan penting karena dapat memperluas pilihan hidup, tetapi pendapatan bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Pendidikan, kesehatan, kebebasan, keamanan, akses informasi, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi-politik juga merupakan bagian dari pembangunan. Pendekatan ini sangat relevan bagi Indonesia karena pembangunan ekonomi nasional harus diarahkan bukan hanya untuk menaikkan angka agregat, tetapi juga untuk memperluas kemampuan warga negara di seluruh wilayah.

Literatur ekonomi kelembagaan juga menunjukkan bahwa kualitas institusi memiliki peranan besar dalam menentukan arah pertumbuhan jangka panjang. Acemoglu, Johnson, dan Robinson menekankan bahwa institusi yang inklusif—yang menjamin hak kepemilikan, kepastian hukum, partisipasi ekonomi yang luas, dan pembatasan kekuasaan yang eksekutif—lebih kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang dibanding institusi yang ekstraktif. ([American Economic Association](#))

Dalam konteks Indonesia, makna institusi inklusif dapat diterjemahkan ke dalam tata kelola perizinan yang transparan, hukum yang konsisten, pelayanan publik yang sederhana, kebijakan fiskal yang adil, pengadaan publik yang bersih, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, serta sistem pendidikan dan kesehatan yang membuka mobilitas sosial. Institusi inklusif bukan hanya soal demokrasi prosedural, tetapi juga kemampuan negara menciptakan aturan main yang adil bagi warga, investor, pekerja, petani, nelayan, dan pengusaha.

Selain itu, literatur ekonomi kompleksitas menekankan bahwa negara menjadi lebih makmur ketika struktur produksinya semakin kompleks, yaitu mampu menghasilkan barang dan jasa yang membutuhkan pengetahuan, teknologi, koordinasi, dan keterampilan tinggi. Hausmann, Hwang, dan Rodrik menunjukkan bahwa apa yang diekspor suatu negara penting bagi pertumbuhan; bukan hanya berapa banyak ekspor, tetapi juga jenis dan kompleksitas produk ekspor. Hidalgo dan Hausmann juga menekankan bahwa kompleksitas ekonomi berkaitan dengan kemampuan produktif yang tersembunyi dalam jaringan pengetahuan, keterampilan, dan organisasi produksi suatu negara. ([Springer Nature](#))

Dengan demikian, Indonesia tidak cukup hanya mengekspor komoditas mentah atau produk bernilai tambah rendah. Indonesia perlu terus bergerak menuju industri manufaktur canggih, agroindustri modern, jasa profesional, ekonomi digital, industri kreatif, teknologi kesehatan, energi bersih, bioteknologi, semikonduktor, electric vehicle ecosystem, dan sektor-sektor masa depan yang memiliki efek pengganda tinggi.

3. Diagnosis Ekonomi Indonesia Kini

Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat dibanding banyak negara berkembang lain. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di sekitar 5%, inflasi dalam beberapa periode relatif terkendali, sektor keuangan cukup tangguh, konsumsi domestik menjadi penyangga utama, dan pasar domestik yang besar memberi bantalan terhadap guncangan eksternal. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 5,61% year-on-year, dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi pada sektor akomodasi dan makanan-minuman sebesar 13,14%, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 21,81%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, pertumbuhan tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi pemerintah dapat membantu menjaga momentum jangka pendek, tetapi peningkatan ekonomi jangka panjang

membutuhkan penguatan investasi produktif, ekspor bernilai tambah, inovasi, produktivitas tenaga kerja, dan kapasitas industri. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu menyeimbangkan stimulus jangka pendek dengan transformasi struktural jangka panjang.

Dari sisi ketenagakerjaan, BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar **4,68%**, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, bertambah 1,896 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Namun, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,49 juta orang atau 28,78% dari total pekerja. Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 tercatat Rp3,29 juta. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata-mata pengangguran terbuka, tetapi kualitas pekerjaan. Sebagian besar pekerja masih berada pada sektor dengan produktivitas relatif rendah dan rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Maka, agenda peningkatan ekonomi harus mencakup penciptaan pekerjaan formal, peningkatan upah berbasis produktivitas, perlindungan sosial adaptif, serta mobilitas tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah menuju sektor berproduktivitas tinggi.

Dari sisi kemiskinan, BPS melaporkan bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi **8,25%**, atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perkotaan tercatat 6,60%, sedangkan kemiskinan perdesaan 10,72%. Angka ini menunjukkan kemajuan, tetapi juga menegaskan bahwa kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dengan demikian, peningkatan ekonomi harus menempatkan desa, pertanian, perikanan, kehutanan sosial, infrastruktur dasar, konektivitas logistik, akses pembiayaan, dan pendidikan vokasional sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Mengurangi kemiskinan bukan hanya soal bantuan sosial, tetapi juga soal menciptakan sistem ekonomi lokal yang produktif.

IMF dalam laporan Article IV 2025 mengenai Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap kuat meskipun menghadapi guncangan, inflasi berada dalam target, dan sektor keuangan secara umum resilien. Namun IMF juga menekankan bahwa risiko berasal dari guncangan kebijakan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan, volatilitas pasar keuangan global, serta kebutuhan reformasi struktural yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan berkualitas, berkelanjutan, dan kaya lapangan kerja. ([IMF](#))

Sementara itu, paparan resmi Bank Indonesia pada Maret 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7% year-on-year, ditopang permintaan domestik yang lebih kuat. Dokumen tersebut juga menekankan disiplin fiskal, stabilitas makro, penguatan modal manusia, ketahanan pangan dan energi, transformasi struktural, serta hilirisasi sebagai agenda prioritas.

Diagnosis ini membawa kita pada kesimpulan penting: Indonesia tidak berada dalam krisis pertumbuhan, tetapi berada dalam tantangan **kualitas transformasi**. Ekonomi tumbuh, tetapi harus dibuat lebih produktif. Kemiskinan turun, tetapi kerentanan masih besar. Investasi masuk, tetapi harus lebih banyak mengalir ke sektor pencipta nilai tambah dan lapangan kerja. Digitalisasi berkembang, tetapi harus inklusif. Hilirisasi berjalan, tetapi harus dihubungkan dengan ekosistem industri nasional dan keberlanjutan lingkungan.

4. Paradigma Baru: Pertumbuhan Berkualitas

Pertumbuhan berkualitas adalah pertumbuhan yang memiliki lima ciri. Pertama, pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan layak. Kedua, pertumbuhan meningkatkan produktivitas. Ketiga, pertumbuhan mengurangi ketimpangan. Keempat, pertumbuhan memperkuat kapasitas industri dan teknologi. Kelima, pertumbuhan menjaga lingkungan hidup.

Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada konsumsi jangka pendek akan mudah melemah ketika daya beli turun. Pertumbuhan yang hanya

bertumpu pada komoditas akan rentan terhadap fluktuasi harga global. Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada pembangunan fisik tanpa peningkatan kualitas manusia dapat menghasilkan infrastruktur yang kurang produktif. Pertumbuhan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dapat menimbulkan ketegangan sosial. Karena itu, kualitas pertumbuhan menjadi isu kunci.

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan berkualitas berarti bahwa setiap kenaikan PDB harus dikaitkan dengan peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan riil, penguatan daya saing daerah, perbaikan kualitas layanan publik, dan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah perlu menggunakan indikator tambahan selain PDB, seperti produktivitas tenaga kerja, tingkat formalitas pekerjaan, indeks pembangunan manusia, rasio gini, tingkat kemiskinan ekstrem, kualitas udara dan air, akses pendidikan, akses kesehatan, serta nilai tambah industri.

Pertumbuhan berkualitas juga membutuhkan keberanian untuk memperbaiki struktur ekonomi. Indonesia tidak boleh puas menjadi pasar besar semata. Indonesia harus menjadi produsen besar, inovator, pusat rantai nilai regional, dan pengelola sumber daya alam yang cerdas. Negara dengan pasar domestik besar tetapi struktur produksi lemah akan mudah menjadi konsumen produk impor. Sebaliknya, negara dengan struktur produksi kuat dapat menggunakan pasar domestik sebagai basis pembelajaran industri, inovasi, dan ekspansi ekspor.

5. Transformasi Produktivitas Nasional

Masalah mendasar ekonomi Indonesia adalah produktivitas. Produktivitas menentukan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan upah tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan. Produktivitas juga menentukan daya saing ekspor, kemampuan industri bertahan, kualitas investasi, dan kapasitas fiskal negara. Jika produktivitas rendah, maka pertumbuhan mudah bergantung pada ekspansi input—lebih banyak tenaga kerja, lebih

banyak lahan, lebih banyak modal—tetapi tidak cukup menghasilkan kenaikan nilai tambah.

Transformasi produktivitas nasional harus dimulai dari tiga arena utama: pendidikan, teknologi, dan organisasi kerja. Pendidikan menghasilkan pengetahuan dasar; teknologi memperbesar kapasitas produksi; dan organisasi kerja menentukan apakah pengetahuan dan teknologi benar-benar digunakan secara efektif. Banyak negara memiliki investasi fisik besar, tetapi produktivitasnya rendah karena organisasi kerja tidak efisien, regulasi membebani, logistik mahal, koordinasi antarlembaga lemah, dan tenaga kerja kurang terampil.

Indonesia membutuhkan gerakan nasional produktivitas yang tidak bersifat sloganistik. Gerakan ini harus menyentuh sekolah, kampus, balai latihan kerja, perusahaan, koperasi, UMKM, desa, BUMN, pemerintah daerah, dan kementerian. Produktivitas harus menjadi bahasa bersama dalam pembangunan.

Pada tingkat perusahaan, produktivitas dapat ditingkatkan melalui digitalisasi proses bisnis, manajemen mutu, lean management, pemanfaatan data, efisiensi energi, pengembangan SDM, dan inovasi produk. Pada tingkat UMKM, produktivitas dapat ditingkatkan melalui akses pembiayaan, pelatihan manajemen, standarisasi produk, packaging, akses pasar digital, pembukuan sederhana, dan integrasi dengan rantai pasok. Pada tingkat nasional, produktivitas memerlukan infrastruktur logistik, kepastian hukum, sistem pendidikan yang relevan, riset terapan, serta regulasi yang tidak menimbulkan biaya transaksi berlebihan.

Sebagai contoh naratif, seorang produsen makanan olahan di daerah dapat memiliki produk yang baik, tetapi sulit naik kelas karena kemasan kurang menarik, izin edar rumit, akses modal terbatas, pemasaran digital lemah, dan tidak terhubung dengan jaringan distribusi modern. Jika pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, platform digital, dan koperasi bekerja bersama, produsen tersebut dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, menaikkan omzet, dan menyerap tenaga kerja lokal. Di sinilah produktivitas menjadi agenda konkret, bukan konsep abstrak.

6. Industrialisasi Baru dan Hilirisasi Bernilai Tambah

Hilirisasi merupakan salah satu agenda penting Indonesia. Secara sederhana, hilirisasi berarti mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi sebelum dijual ke pasar domestik maupun global. Dalam sektor mineral, hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekspor, menarik investasi, dan membangun ekosistem industri. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan petani jika rantai nilai didesain adil. Dalam sektor perikanan dan kelautan, hilirisasi dapat menciptakan industri pengolahan, cold chain, logistik, dan ekspor produk berkualitas.

Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau pabrik pengolahan tahap awal. Hilirisasi yang kuat harus bergerak menuju **deep industrialization**. Artinya, Indonesia tidak hanya mengolah bijih menjadi bahan antara, tetapi juga membangun industri turunan, riset material, komponen, mesin, desain produk, standar kualitas, merek, dan jaringan pemasaran global.

Rodrik menunjukkan bahwa banyak negara berkembang mengalami gejala deindustrialisasi prematur, yaitu kehilangan peluang industrialisasi pada tingkat pendapatan yang masih relatif rendah. Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia agar tidak melewatkan momentum memperkuat manufaktur dan industri bernilai tambah. ([IDEAS/RePEc](#))

Aiginger dan Rodrik juga menekankan kebangkitan kembali kebijakan industri dalam abad ke-21. Kebijakan industri modern bukan sekadar proteksi, subsidi, atau penunjukan pemenang, melainkan koordinasi strategis antara negara dan sektor swasta untuk mengatasi kegagalan pasar, membangun kapabilitas, memperbaiki ekosistem inovasi, dan menciptakan transformasi produktif. ([Springer Nature](#))

Bagi Indonesia, kebijakan industri baru harus memadukan lima hal. Pertama, pemilihan sektor strategis berdasarkan potensi nilai tambah, penyerapan kerja, kompleksitas teknologi, dan peluang ekspor. Kedua,

penguatan rantai pasok domestik agar industri besar tidak berdiri terpisah dari UMKM dan pemasok lokal. Ketiga, riset dan pengembangan yang terhubung dengan kebutuhan industri. Keempat, pendidikan vokasional berbasis klaster industri. Kelima, tata kelola insentif yang transparan, terukur, dan dievaluasi berdasarkan kinerja.

Hilirisasi nikel, misalnya, dapat menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem baterai, kendaraan listrik, material maju, dan energi bersih. Tetapi tanpa penguasaan teknologi, transfer pengetahuan, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan pemasok domestik, hilirisasi dapat terjebak menjadi enclave industry: besar secara investasi, tetapi terbatas dampaknya bagi ekonomi lokal. Karena itu, hilirisasi harus dikaitkan dengan local content, industrial learning, environmental safeguards, dan human capital upgrading.

7. UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Rakyat

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, dalam banyak kasus, UMKM juga menghadapi kendala klasik: modal terbatas, teknologi rendah, akses pasar sempit, kualitas produk tidak konsisten, manajemen keuangan lemah, dan sulit masuk ke rantai pasok modern. Karena itu, strategi peningkatan ekonomi Indonesia harus menjadikan UMKM bukan hanya objek bantuan, tetapi subjek transformasi produktif.

Penguatan UMKM harus bergerak dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktivitas. Bantuan modal penting, tetapi tidak cukup. UMKM membutuhkan literasi keuangan, akses pasar, pendampingan manajemen, standardisasi, legalitas, teknologi, kemasan, desain, pencatatan digital, serta koneksi dengan pembeli besar. Pemerintah juga perlu membantu UMKM masuk ke pengadaan barang dan jasa publik secara adil dan transparan.

Digitalisasi membuka peluang besar. Marketplace, pembayaran digital, media sosial, logistik online, dan pembukuan digital dapat membantu UMKM memperluas pasar. Tetapi digitalisasi juga menciptakan tantangan

baru: persaingan harga sangat ketat, biaya komisi platform, ketergantungan pada algoritma, dan kebutuhan kemampuan pemasaran digital. Oleh sebab itu, literasi digital UMKM harus mencakup strategi branding, analisis pelanggan, keamanan transaksi, pengelolaan stok, dan pelayanan purna jual.

Kasus sederhana dapat dilihat pada usaha kopi lokal. Petani kopi menghasilkan bahan baku, tetapi nilai tambah terbesar sering berada pada roasting, branding, packaging, kafe, distribusi, dan ekspor specialty coffee. Jika petani hanya menjual biji mentah, pendapatan terbatas. Tetapi jika koperasi petani mampu mengolah, mengemas, memperoleh sertifikasi, membangun merek, dan menjual melalui kanal digital, nilai tambah dapat dinikmati lebih besar di tingkat lokal. Di sinilah UMKM, koperasi, dan digitalisasi dapat menjadi instrumen kesejahteraan inklusif.

8. Ekonomi Digital, AI, dan Inovasi

Ekonomi digital bukan lagi sektor pinggiran. Ia telah menjadi infrastruktur baru bagi perdagangan, pendidikan, layanan keuangan, kesehatan, logistik, pemerintahan, dan industri kreatif. Laporan e-Conomy SEA 2025 menyebut ekonomi digital Asia Tenggara telah tumbuh dari sekitar US\$40 miliar GMV satu dekade sebelumnya menjadi lebih dari US\$300 miliar pada 2025, dengan pergeseran penting menuju monetisasi dan pendapatan digital yang lebih kuat. ([Bain](#))

Bagi Indonesia, ekonomi digital dapat menjadi motor pertumbuhan baru karena populasi besar, penetrasi internet tinggi, dan aktivitas perdagangan daring yang berkembang. Namun, manfaat ekonomi digital tidak otomatis inklusif. Tanpa infrastruktur digital yang merata, literasi digital, perlindungan data, keamanan siber, dan persaingan usaha yang sehat, ekonomi digital dapat memperlebar ketimpangan antara pelaku besar dan kecil, antara kota dan desa, serta antara pekerja berkeahlian tinggi dan rendah.

AI atau kecerdasan buatan menjadi dimensi baru. AI dapat meningkatkan produktivitas melalui otomasi administrasi, analisis data, peramalan permintaan, diagnosis kesehatan, personalisasi pendidikan, optimasi logistik, deteksi fraud, dan desain produk. Tetapi AI juga dapat menggeser pekerjaan rutin, memperbesar bias algoritmik, serta menciptakan ketergantungan pada platform dan infrastruktur asing.

Karena itu, Indonesia perlu membangun strategi AI nasional yang berorientasi pada produktivitas dan inklusi. AI perlu digunakan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, birokrasi, dan industri. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum AI terapan untuk manajemen, ekonomi, akuntansi, pemasaran, logistik, dan kebijakan publik. Dunia usaha perlu mengadopsi AI bukan sekadar sebagai gimmick, melainkan sebagai alat transformasi proses bisnis.

Dalam dunia pertanian, misalnya, AI dapat membantu prediksi cuaca mikro, deteksi hama, optimasi pupuk, dan pemetaan risiko panen. Dalam logistik, AI dapat membantu perencanaan rute dan efisiensi gudang. Dalam pemerintahan, AI dapat membantu analisis data kemiskinan, deteksi anomali anggaran, dan pelayanan publik berbasis chatbot. Namun, semua itu membutuhkan data yang berkualitas, tata kelola etis, infrastruktur digital, dan kemampuan SDM.

9. Human Capital: Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan

Tidak ada negara yang dapat menjadi maju tanpa manusia yang berkualitas. Human capital merupakan fondasi produktivitas, inovasi, tata kelola, dan daya saing. Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi bonus tersebut dapat berubah menjadi beban jika tidak disertai pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang memadai.

Pendidikan Indonesia perlu bergerak dari sekadar perluasan akses menuju peningkatan mutu. Akses sekolah penting, tetapi kualitas pembelajaran lebih menentukan masa depan. Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Masalah

mismatch antara pendidikan dan pekerjaan harus diatasi melalui kurikulum adaptif, pendidikan vokasional, magang industri, micro-credentials, pembelajaran sepanjang hayat, dan kolaborasi kampus-industri.

Di era AI dan otomasi, keterampilan yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga critical thinking, creativity, collaboration, communication, digital literacy, data literacy, ethical reasoning, dan adaptive learning. Generasi muda harus mampu bekerja dengan teknologi, bukan hanya digantikan oleh teknologi.

Kesehatan juga bagian dari human capital. Tenaga kerja yang sehat lebih produktif. Anak yang cukup gizi memiliki kemampuan belajar lebih baik. Ibu yang sehat melahirkan generasi yang lebih kuat. Karena itu, investasi pada kesehatan primer, gizi, sanitasi, air bersih, pencegahan stunting, kesehatan mental, dan layanan kesehatan digital harus dilihat sebagai investasi ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks daerah, pendidikan dan kesehatan juga menentukan pemerataan ekonomi. Daerah dengan SDM lemah sulit menarik investasi produktif. Sebaliknya, daerah dengan tenaga kerja terampil, layanan kesehatan baik, dan pemerintahan efektif lebih mudah membangun kluster ekonomi baru. Oleh sebab itu, pembangunan SDM tidak boleh dipusatkan di kota besar; ia harus menjadi agenda nasional lintas wilayah.

10. Ketahanan Pangan, Energi, dan Air

Peningkatan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketahanan pangan, energi, dan air. Ketiga sektor ini merupakan basis kehidupan dan stabilitas nasional. Ketika harga pangan naik, daya beli rumah tangga menurun. Ketika energi mahal atau tidak stabil, biaya produksi meningkat. Ketika air bersih dan irigasi terganggu, produktivitas pertanian turun. Perubahan iklim memperbesar risiko kekeringan, banjir, gagal panen, kebakaran hutan, dan kerusakan pesisir.

Ketahanan pangan tidak cukup diartikan sebagai swasembada satu atau dua komoditas. Ketahanan pangan harus mencakup ketersediaan, keterjangkauan, kualitas gizi, keberagaman pangan, stabilitas pasokan, dan kesejahteraan petani. Indonesia perlu memperkuat produksi pangan lokal, memperbaiki irigasi, membangun cold chain, mengurangi food loss, memperluas asuransi pertanian, mengembangkan benih unggul, dan menghubungkan petani dengan pasar modern.

Ketahanan energi juga harus dibaca dalam kerangka transisi. Indonesia masih memiliki sumber daya energi fosil, tetapi dunia bergerak menuju ekonomi rendah karbon. Karena itu, Indonesia perlu menjaga keamanan energi sambil mempercepat energi terbarukan, efisiensi energi, elektrifikasi transportasi, bioenergi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau. Transisi energi harus adil: tidak boleh membebani masyarakat miskin, tetapi juga tidak boleh menunda inovasi.

Air merupakan isu strategis yang sering kurang diperhatikan. Urbanisasi, deforestasi, pertanian intensif, dan perubahan iklim membuat tekanan terhadap air semakin besar. Pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, konservasi tanah, sanitasi, dan teknologi irigasi hemat air harus menjadi bagian dari agenda ekonomi. Tanpa air yang cukup dan bersih, pertanian, industri, kesehatan, dan kehidupan kota akan terganggu.

11. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Ekonomi masa depan tidak dapat dibangun dengan pola ekstraksi tanpa batas. Indonesia memiliki hutan tropis, keanekaragaman hayati, laut luas, mangrove, terumbu karang, dan potensi energi terbarukan. Kekayaan ekologis ini adalah modal ekonomi jangka panjang. Jika dikelola buruk, ia menjadi sumber bencana; jika dikelola baik, ia menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan.

Ekonomi hijau mencakup energi bersih, pertanian berkelanjutan, industri rendah karbon, transportasi publik, bangunan hemat energi, ekonomi sirkular, dan konservasi ekosistem. Ekonomi biru mencakup perikanan

berkelanjutan, budidaya laut, bioteknologi kelautan, wisata bahari, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan perlindungan ekosistem pesisir.

Indonesia perlu menghindari dikotomi palsu antara pertumbuhan dan lingkungan. Dalam paradigma lama, perlindungan lingkungan sering dianggap menghambat ekonomi. Dalam paradigma baru, lingkungan yang sehat adalah prasyarat ekonomi jangka panjang. Banjir, polusi, krisis air, abrasi, dan kerusakan hutan menimbulkan biaya ekonomi besar. Karena itu, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar agenda moral, melainkan agenda efisiensi ekonomi.

Ekonomi hijau-biru juga dapat menciptakan pekerjaan baru. Restorasi mangrove, energi surya, pengolahan limbah, transportasi publik, pariwisata ekologis, perikanan berkelanjutan, dan pertanian regeneratif dapat menjadi sumber pekerjaan lokal. Namun, pekerjaan hijau membutuhkan keterampilan baru. Karena itu, transisi hijau harus dikaitkan dengan pelatihan tenaga kerja.

12. Reformasi Fiskal dan Belanja Publik Berkualitas

Peningkatan ekonomi membutuhkan fiskal yang sehat dan efektif. Fiskal bukan hanya soal besarnya belanja negara, tetapi kualitas belanja. Belanja publik harus menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang jelas: sekolah lebih baik, layanan kesehatan lebih kuat, infrastruktur produktif, riset terapan, perlindungan sosial tepat sasaran, dan dukungan terhadap transformasi industri.

Belanja yang tidak efektif dapat memperbesar defisit tanpa meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, belanja yang berkualitas dapat menciptakan multiplier effect. Infrastruktur jalan yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar menurunkan biaya logistik. Irigasi meningkatkan produktivitas petani. Pendidikan vokasional menaikkan employability. Digitalisasi layanan publik menurunkan biaya transaksi. Riset pertanian menghasilkan benih unggul. Program gizi meningkatkan kemampuan belajar anak.

Bank Indonesia dalam paparan Maret 2026 menyebut bahwa kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan sambil menjaga disiplin fiskal, dengan fokus pada kualitas belanja, penguatan modal manusia, ketahanan pangan dan energi, serta transformasi struktural.

Reformasi fiskal juga perlu memperhatikan sisi penerimaan. Indonesia membutuhkan basis pajak yang lebih kuat, administrasi pajak yang modern, kepatuhan yang adil, dan pengurangan kebocoran. Namun, reformasi pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membebani kelompok rentan dan UMKM kecil. Prinsipnya adalah memperluas basis pajak, meningkatkan keadilan, dan memastikan bahwa pajak kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang nyata.

13. Tata Kelola, Kepastian Hukum, dan Kepercayaan

Ekonomi modern dibangun di atas kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian hukum. Pelaku UMKM membutuhkan aturan yang sederhana. Pekerja membutuhkan perlindungan. Masyarakat membutuhkan layanan publik yang adil. Pemerintah membutuhkan legitimasi. Tanpa kepercayaan, biaya transaksi meningkat: orang enggan berinvestasi, pelaku usaha mencari jalan pintas, inovasi melemah, dan masyarakat menjadi sinis terhadap kebijakan.

Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, konsistensi regulasi, penegakan hukum, partisipasi publik, dan pengendalian korupsi. Reformasi birokrasi bukan hanya soal digitalisasi formulir, tetapi perubahan budaya pelayanan. Pemerintah harus menjadi enabler, bukan bottleneck. Regulasi harus melindungi kepentingan publik, tetapi tidak menciptakan ketidakpastian yang berlebihan.

Dalam konteks investasi, kepastian hukum menentukan kualitas investasi. Investasi jangka pendek dapat masuk karena insentif, tetapi investasi jangka panjang membutuhkan stabilitas aturan, perlindungan kontrak, perizinan yang dapat diprediksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa

yang kredibel. Tanpa itu, investor akan menuntut premi risiko lebih tinggi atau memilih negara lain.

Tata kelola juga penting dalam hilirisasi, pengadaan publik, subsidi, bantuan sosial, dan proyek strategis. Program besar tanpa tata kelola kuat dapat menimbulkan pemborosan dan ketimpangan manfaat. Sebaliknya, program besar dengan tata kelola baik dapat menjadi penggerak transformasi nasional.

14. Pemerataan Wilayah dan Ekonomi Daerah

Indonesia adalah negara kepulauan besar. Peningkatan ekonomi nasional tidak akan berkelanjutan jika terlalu terkonsentrasi di wilayah tertentu. Dominasi Pulau Jawa dalam struktur ekonomi nasional menunjukkan kekuatan aglomerasi, tetapi juga memperlihatkan perlunya strategi pemerataan yang lebih efektif. BPS mencatat kontribusi Pulau Jawa terhadap struktur ekonomi Indonesia triwulan I-2026 sebesar 57,24%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pemerataan wilayah tidak berarti memaksa semua daerah memiliki struktur ekonomi yang sama. Setiap daerah memiliki keunggulan berbeda: pertanian, perikanan, kehutanan, tambang, pariwisata, industri kreatif, pendidikan, jasa, logistik, energi, atau ekonomi perbatasan. Tugas kebijakan publik adalah membantu daerah menemukan dan mengembangkan keunggulan produktifnya.

Pembangunan daerah membutuhkan tiga konektivitas: konektivitas fisik, konektivitas digital, dan konektivitas kelembagaan. Konektivitas fisik mencakup jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air, dan logistik. Konektivitas digital mencakup internet, data, platform, dan literasi digital. Konektivitas kelembagaan mencakup koordinasi pusat-daerah, regulasi yang sinkron, kapasitas pemerintah daerah, dan kemitraan dengan perguruan tinggi serta dunia usaha.

Perguruan tinggi daerah dapat menjadi pusat inovasi lokal. Misalnya, kampus di wilayah pertanian dapat mengembangkan riset benih, teknologi pascapanen, dan agribisnis digital. Kampus di wilayah pesisir dapat mengembangkan perikanan berkelanjutan, konservasi mangrove, dan wisata bahari. Kampus di wilayah industri dapat mendukung vokasi, rekayasa proses, dan manajemen mutu. Dengan demikian, pendidikan tinggi harus terhubung dengan agenda ekonomi daerah.

15. Pertanian Modern dan Kesejahteraan Petani

Pertanian masih menyerap tenaga kerja besar, tetapi produktivitas dan pendapatan petani sering tertinggal dibanding sektor lain. Karena itu, modernisasi pertanian merupakan agenda penting peningkatan ekonomi Indonesia. Modernisasi pertanian bukan berarti menggusur petani kecil, tetapi memperkuat kemampuan mereka melalui teknologi, kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar.

Pertanian modern memerlukan benih unggul, mekanisasi tepat guna, irigasi baik, pupuk efisien, data cuaca, asuransi, penyuluhan digital, koperasi kuat, dan sistem logistik dingin. Petani juga harus memperoleh posisi tawar lebih baik dalam rantai nilai. Jika petani hanya menjual gabah atau bahan mentah, nilai tambah kecil. Jika petani terhubung dengan pengolahan, branding, distribusi, dan pasar, pendapatan dapat meningkat.

Koperasi modern dapat memainkan peran penting. Koperasi bukan hanya lembaga simpan pinjam, tetapi agregator produksi, penyedia input, pengelola gudang, pengolah hasil, pemasar, dan mitra industri. Dengan skala ekonomi kolektif, petani kecil dapat mengakses teknologi dan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pertanian juga harus dikaitkan dengan keberlanjutan. Penggunaan pupuk dan pestisida harus efisien. Tanah harus dijaga. Air harus dikelola. Deforestasi harus dicegah. Pertanian yang merusak lingkungan mungkin menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi merugikan produktivitas jangka panjang.

16. Perikanan, Kelautan, dan Ekonomi Maritim

Indonesia memiliki potensi maritim besar, tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi. Laut Indonesia dapat menjadi sumber pangan, energi, transportasi, pariwisata, bioteknologi, dan diplomasi ekonomi. Namun, sektor maritim menghadapi masalah klasik: illegal fishing, overfishing, logistik mahal, pelabuhan belum optimal, cold chain terbatas, akses pembiayaan nelayan lemah, serta kerusakan ekosistem pesisir.

Peningkatan ekonomi maritim harus menggabungkan produktivitas dan konservasi. Perikanan tangkap perlu dikelola berdasarkan kuota ilmiah dan pengawasan yang kuat. Budidaya laut perlu dikembangkan dengan standar lingkungan. Industri pengolahan ikan harus diperkuat agar ekspor tidak hanya berupa bahan mentah. Nelayan kecil perlu memperoleh akses teknologi, informasi cuaca, asuransi, BBM yang tepat sasaran, dan pasar yang adil.

Ekonomi maritim juga mencakup logistik. Sebagai negara kepulauan, biaya logistik sangat menentukan harga barang dan daya saing daerah. Pelabuhan yang efisien, kapal penghubung, digitalisasi logistik, dan integrasi multimoda dapat menurunkan biaya ekonomi. Jika logistik antarwilayah membaik, produk daerah dapat masuk pasar nasional dan ekspor dengan lebih kompetitif.

17. Perlindungan Sosial Adaptif

Pertumbuhan inklusif membutuhkan perlindungan sosial. Perlindungan sosial bukan sekadar bantuan kepada orang miskin, tetapi sistem untuk menjaga masyarakat dari risiko ekonomi: kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, gagal panen, inflasi pangan, disabilitas, dan usia tua. Dalam ekonomi yang berubah cepat, perlindungan sosial harus adaptif.

Perlindungan sosial adaptif memiliki tiga ciri. Pertama, berbasis data yang akurat dan diperbarui. Kedua, mampu merespons krisis dengan cepat. Ketiga, terhubung dengan program pemberdayaan agar penerima bantuan dapat naik kelas. Bantuan sosial penting untuk menjaga konsumsi dasar, tetapi harus disertai akses pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, pembiayaan mikro, dan kesempatan usaha.

Indonesia perlu memperkuat integrasi data sosial-ekonomi. Banyak program pemerintah menggunakan basis data berbeda, sehingga akurasi sasaran menjadi tantangan. Digital ID, interoperabilitas data, dan perlindungan data pribadi menjadi penting. Namun, digitalisasi tidak boleh mengabaikan kelompok yang kurang melek digital. Sistem harus mudah diakses, manusiawi, dan menyediakan mekanisme pengaduan.

18. Keuangan Inklusif dan Pembiayaan Produktif

Peningkatan ekonomi membutuhkan pembiayaan. Tetapi pembiayaan harus produktif, bukan hanya konsumtif. UMKM, petani, nelayan, koperasi, startup, industri kecil, dan pelaku ekonomi daerah memerlukan akses modal yang terjangkau. Namun, lembaga keuangan sering menilai mereka berisiko tinggi karena tidak memiliki agunan, laporan keuangan, atau rekam jejak kredit formal.

Keuangan inklusif harus mempertemukan prudential banking dengan inovasi pembiayaan. Digital credit scoring, invoice financing, supply chain financing, koperasi modern, bank daerah, fintech produktif, dan penjaminan kredit dapat membantu memperluas akses modal. Namun, perlindungan konsumen harus kuat agar masyarakat tidak terjerat pinjaman predator.

Pembiayaan produktif juga membutuhkan literasi keuangan. Banyak usaha kecil gagal bukan karena tidak memiliki produk, tetapi karena tidak memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, tidak mencatat arus kas, salah menghitung harga pokok, atau tidak memahami risiko utang. Karena itu, akses modal harus disertai pendampingan manajemen.

19. Peran BUMN, Swasta, Koperasi, dan Masyarakat

Peningkatan ekonomi Indonesia membutuhkan sinergi empat aktor: negara, swasta, koperasi, dan masyarakat. Negara berperan menetapkan arah, menyediakan infrastruktur, menjaga stabilitas, melindungi kepentingan publik, dan mengoreksi kegagalan pasar. Swasta berperan menciptakan investasi, inovasi, efisiensi, dan lapangan kerja. Koperasi berperan memperkuat ekonomi kolektif rakyat. Masyarakat sipil berperan menjaga akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial.

BUMN dapat menjadi instrumen strategis jika dikelola profesional, transparan, dan berorientasi nilai tambah nasional. BUMN dapat membangun infrastruktur, memperkuat sektor strategis, dan membuka pasar bagi UMKM. Namun, BUMN juga harus menghindari inefisiensi, konflik kepentingan, dan dominasi yang mematikan kompetisi sehat.

Sektor swasta perlu dilibatkan dalam kebijakan industri, pendidikan vokasi, riset, dan ekspor. Namun, kemitraan negara-swasta harus transparan agar tidak berubah menjadi rente. Koperasi perlu dimodernisasi agar mampu bersaing. Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam proyek pembangunan agar tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

20. Ekonomi Politik Peningkatan Ekonomi

Kebijakan ekonomi tidak berlangsung di ruang hampa. Ia selalu berada dalam konteks politik, kepentingan, institusi, dan distribusi kekuasaan. Reformasi ekonomi sering sulit bukan karena tidak ada ide teknis, tetapi karena ada kelompok yang diuntungkan oleh status quo. Subsidi yang tidak tepat sasaran, regulasi yang rumit, monopoli, perizinan yang tidak transparan, dan rente ekonomi dapat bertahan karena memiliki pendukung kuat.

Karena itu, peningkatan ekonomi Indonesia membutuhkan keberanian politik dan kapasitas teknokratis. Keberanian politik diperlukan untuk

mengubah kebijakan yang tidak efektif. Kapasitas teknokratis diperlukan agar perubahan dilakukan dengan desain yang baik, data yang benar, dan mitigasi dampak sosial.

Reformasi subsidi energi, misalnya, secara ekonomi mungkin diperlukan agar anggaran dapat dialihkan ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Tetapi reformasi tersebut harus dilakukan hati-hati karena berdampak langsung pada biaya hidup. Reformasi harus disertai komunikasi publik, kompensasi tepat sasaran, transportasi publik yang lebih baik, dan perlindungan bagi kelompok rentan.

21. Agenda Kebijakan Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, Indonesia perlu menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, penciptaan kerja, dan kepercayaan pasar. Kebijakan jangka pendek harus fokus pada stabilisasi tanpa kehilangan arah transformasi.

Pertama, pemerintah perlu menjaga inflasi pangan melalui manajemen stok, distribusi, produksi lokal, dan pengawasan rantai pasok. Kedua, program perlindungan sosial perlu tepat sasaran untuk menjaga konsumsi kelompok rentan. Ketiga, stimulus ekonomi harus diarahkan pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti konstruksi padat karya, pertanian, UMKM, pariwisata lokal, dan infrastruktur dasar. Keempat, pemerintah perlu mempercepat belanja yang produktif tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Kelima, perlu ada dukungan khusus bagi UMKM yang terdampak tekanan biaya, termasuk akses modal kerja, restrukturisasi pinjaman, dan bantuan digitalisasi. Keenam, pemerintah perlu menjaga komunikasi kebijakan agar pelaku pasar memahami arah ekonomi nasional. Ketidakpastian kebijakan sering lebih merusak daripada kebijakan yang ketat tetapi jelas.

22. Agenda Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, prioritas utama adalah transformasi produktif. Indonesia perlu memperkuat manufaktur, agroindustri, ekonomi digital, energi bersih, dan jasa modern. Pendidikan vokasional harus dihubungkan dengan klaster industri. Hilirisasi harus diperluas ke produk turunan. UMKM harus masuk rantai pasok. Daerah harus membangun keunggulan lokal.

Kebijakan jangka menengah perlu memiliki indikator yang jelas: peningkatan produktivitas tenaga kerja, kenaikan kontribusi manufaktur bernilai tambah, pertumbuhan ekspor kompleks, penurunan biaya logistik, kenaikan formalitas kerja, peningkatan investasi R&D, dan penurunan kemiskinan perdesaan.

Selain itu, reformasi regulasi harus berkelanjutan. Perizinan yang sederhana, kepastian tata ruang, penyelesaian sengketa, perlindungan investor, perlindungan pekerja, dan standar lingkungan harus berjalan seimbang. Negara harus mampu menjadi fasilitator transformasi, bukan sekadar regulator administratif.

23. Agenda Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, Indonesia harus membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Negara maju bukan hanya memiliki sumber daya alam, tetapi memiliki institusi, teknologi, pendidikan, riset, budaya inovasi, dan kemampuan organisasi. Indonesia harus berinvestasi pada ilmu pengetahuan, universitas riset, pusat inovasi, teknologi strategis, dan industri masa depan.

Agenda jangka panjang mencakup pengembangan ekosistem semikonduktor, bioteknologi, teknologi pangan, teknologi kesehatan, energi bersih, kecerdasan buatan, maritim canggih, dan material maju. Indonesia juga harus memperkuat bahasa ilmu pengetahuan, literasi sains, budaya riset, dan kolaborasi internasional.

Namun, ekonomi berbasis pengetahuan tidak boleh hanya terkonsentrasi di elite perkotaan. Ia harus menyentuh sekolah desa, pesantren, politeknik,

koperasi, petani, nelayan, dan UMKM. Inovasi sejati adalah inovasi yang memperluas kemampuan masyarakat.

24. Indikator Keberhasilan

Untuk memastikan bahwa peningkatan ekonomi benar-benar menuju kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan, Indonesia perlu menggunakan indikator yang lebih luas. Beberapa indikator penting adalah:

1. Pertumbuhan PDB riil dan PDB per kapita.
2. Produktivitas tenaga kerja per sektor.
3. Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
4. Rasio gini dan ketimpangan antarwilayah.
5. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat formalitas kerja.
6. Rata-rata upah riil.
7. Kontribusi manufaktur bernilai tambah.
8. Kompleksitas ekspor dan diversifikasi produk.
9. Biaya logistik nasional.
10. Indeks pembangunan manusia.
11. Akses pendidikan dan kesehatan berkualitas.
12. Emisi karbon per unit PDB.
13. Kualitas lingkungan, air, hutan, dan pesisir.
14. Akses internet dan literasi digital.
15. Kepercayaan publik terhadap institusi.

Dengan indikator tersebut, pembangunan ekonomi tidak hanya dinilai dari "berapa besar ekonomi tumbuh", tetapi juga "siapa yang menikmati", "bagaimana pertumbuhan dihasilkan", dan "apakah pertumbuhan dapat bertahan".

25. Penutup

Meningkatkan ekonomi Indonesia kini adalah agenda besar yang membutuhkan cara berpikir baru. Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus membangun kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan tetap penting, tetapi harus berkualitas. Investasi tetap penting, tetapi harus produktif. Hilirisasi tetap penting, tetapi harus memperkuat kapabilitas domestik. Digitalisasi tetap penting, tetapi harus inklusif. Perlindungan sosial tetap penting, tetapi harus memberdayakan. Pembangunan daerah tetap penting, tetapi harus berbasis keunggulan lokal. Ekonomi hijau-biru tetap penting, karena masa depan ekonomi bergantung pada keberlanjutan ekologis.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju, tetapi peluang tersebut tidak otomatis menjadi kenyataan. Diperlukan konsistensi kebijakan, keberanian reformasi, kualitas institusi, produktivitas SDM, inovasi teknologi, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan tahunan, tetapi oleh kemampuan bangsa membangun sistem ekonomi yang produktif, adil, tangguh, dan bermartabat.

Dengan demikian, peningkatan ekonomi Indonesia harus dipahami sebagai gerakan nasional: negara yang efektif, pasar yang dinamis, masyarakat yang berdaya, daerah yang produktif, dan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Inilah jalan dari pertumbuhan menuju kesejahteraan inklusif dan berkelanjutan.

Glossarium

Bonus demografi: Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi jika disertai pendidikan dan pekerjaan yang memadai.

Capabilty approach: Pendekatan pembangunan yang menekankan perluasan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang bernilai, bukan sekadar peningkatan pendapatan.

Deindustrialisasi prematur: Penurunan peran industri manufaktur sebelum suatu negara mencapai tingkat pendapatan tinggi.

Ekonomi biru: Model ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara produktif dan berkelanjutan.

Ekonomi digital: Aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai basis produksi, distribusi, transaksi, dan inovasi.

Ekonomi hijau: Model ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis.

Ekonomi inklusif: Sistem ekonomi yang membuka kesempatan luas bagi seluruh kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Ekonomi kompleksitas: Pendekatan yang melihat kemajuan ekonomi berdasarkan keragaman dan kecanggihan kemampuan produktif suatu negara.

Formalitas kerja: Kondisi pekerjaan yang memiliki kontrak, perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kepastian upah.

Hilirisasi: Proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

Human capital: Modal manusia berupa pendidikan, kesehatan, keterampilan, etos kerja, dan kemampuan produktif.

Inclusive institutions: Institusi yang memungkinkan partisipasi luas, perlindungan hak, kepastian hukum, dan kesempatan ekonomi yang adil.

Kesejahteraan berkelanjutan: Kesejahteraan yang tidak hanya dinikmati generasi sekarang, tetapi juga tidak merusak kemampuan generasi mendatang untuk hidup layak.

Ketahanan pangan: Kemampuan sistem pangan menyediakan makanan yang cukup, terjangkau, bergizi, aman, dan stabil.

Ketahanan energi: Kemampuan negara menyediakan energi yang cukup, terjangkau, aman, dan berkelanjutan.

Koperasi modern: Koperasi yang tidak hanya menjalankan simpan pinjam, tetapi juga menjadi agregator produksi, pemasaran, pembiayaan, teknologi, dan rantai nilai.

PDB: Produk Domestik Bruto, yaitu nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode tertentu.

Pertumbuhan berkualitas: Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan pekerjaan layak, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, memperkuat industri, dan menjaga lingkungan.

Produktivitas: Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih bernilai dengan input tertentu.

Rantai nilai: Seluruh proses penciptaan nilai dari bahan baku, produksi, distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual.

Reformasi struktural: Perubahan kebijakan dan institusi yang bertujuan memperbaiki fondasi ekonomi jangka panjang.

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar seseorang dapat beralih ke pekerjaan atau peran baru.

Upskilling: Peningkatan keterampilan agar seseorang lebih produktif dalam pekerjaan yang sedang dijalani.

UMKM naik kelas: Proses peningkatan kapasitas UMKM dari usaha kecil informal menuju usaha yang lebih produktif, legal, digital, bankable, dan terhubung pasar lebih luas.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401. DOI: 10.1257/aer.91.5.1369.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as the fundamental cause of long-run growth. Dalam P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. DOI: 10.1016/S1574-0684(05)01006-3.
- Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century. *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20, 189–207. DOI: 10.1007/s10842-019-00322-3.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). *Indonesia's economic growth in Q1-2026 was 5.61 percent (Y-on-Y)*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). *Unemployment rate was 4.68 percent and the average wage of employees was 3.29 million rupiah*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). *In September 2025, the percentage of the poor population decreased to 8.25 percent*. BPS-Statistics Indonesia.
- Bank Indonesia. (2026). *Republic of Indonesia presentation book—March 2026*. Bank Indonesia.
- Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. *Journal of Economic Growth*, 12, 1–25. DOI: 10.1007/s10887-006-9009-4.
- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575. DOI: 10.1073/pnas.0900943106.
- International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia* (IMF Country Report No. 2026/010). DOI: 10.5089/9798229035576.002.

Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policies: Challenges and opportunities. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 803–815. DOI: 10.1093/icc/dty034.

Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth*, 21, 1–33. DOI: 10.1007/s10887-015-9122-3.

Sen, A. (1989). Development as capability expansion. *Journal of Development Planning*, 19, 41–58. DOI: 10.1007/978-1-349-21136-4_3.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.

Kopilot artikel ini - Chatgpt 5, tanggal akses: 8 Juli 2026. Prompting dan Akun penulis ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/6a4ddb1f1-9ea0-83ec-99df-b331a3428514)). <https://chatgpt.com/c/6a4ddb1f1-9ea0-83ec-99df-b331a3428514>